

**ANALISIS DAMPAK *TAX MORALE* TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA
SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan program sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

MUSLIMAH MAHMUDAH

NIM. 12020113140117

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2017

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Muslimah Mahmudah
Nomor Induk Mahasiswa : 12020113140117
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : **ANALISIS DAMPAK *TAX MORALE*
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI
KOTA SEMARANG**
Dosen Pembimbing : Dr. Agr Deden Dinar Iskandar, S.E., MA..

Semarang, 04 September 2017

Dosen Pembimbing,

(Dr. Agr Deden Dinar Iskandar, S.E., MA.)

NIP. 197804022006041016

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Muslimah Mahmudah
Nomor Induk Mahasiswa : 12020113140117
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : **ANALISIS DAMPAK TAX MORALE
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM
DI KOTA SEMARANG**

Telah dinyatakan Lulus Ujian pada tanggal 13 September 2017

Tim Penguji :

1. Dr. Agr Deden Dinar Iskandar, S.E., MA. (.....)
2. Arif Pujiyono,,S.E., M.Si. (.....)
3. Dr. Jaka Aminata, S.E., MA. (.....)

Mengetahui

Pembantu Dekan I,

(Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.)

NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Muslimah Mahmudah, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **ANALISIS DAMPAK TAX MORALE TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG**, adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 04 September 2017

Yang membuat pernyataan

Muslimah Mahmudah

NIM. 12020113140117

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri.
(Q.S. Ar-Ra'd:11)

Learn from yesterday , live today , hopefully for tomorrow . The important thing is not to stop questioning.

(Albert Einstein)

The biggest risk is not taking any risk. In a word that changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.

(Mark Zuckerberg)

Skripsi ini ku persembahkan untuk ayah, bunda, dan ketiga kakak ku tercinta,
Serta orang terkasih yang selama ini selalu ada dan memberi semangat,
Terimakasih atas cinta, kasih, dan sayang yang kalian berikan dan perjuangkan,
Semoga ini adalah awal goresan indah yang terlukis dimasa depan.

7.7.17

ABSTRACT

Tax morale is an intrinsic motivation to comply and pay taxes so as to contribute voluntarily to the provision of public goods. Higher tax morale will increase tax compliance. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role to supporting the regional and national economy. This study aims to analyze the impact of tax morale on MSMEs tax compliance in Semarang City. This study uses tax morale consisting of: (1) happiness, (2) religiosity, (3) environment, (4) institutional, and (5) ethics as independent variable and control variables such as: (1) gender, (2) age, (3) education, (4) marital status, (5) age of business, (6) business size and dependent variable in this study using MSMEs tax compliance. The type of data used is the primary data obtained from 117 samples of MSMEs in Semarang City as well as secondary data as supporting data in this study. Data analysis was performed by using binary logistic regression analysis with STATA 14 for Windows program. The results showed that environmental, institutional, ethical, business, and business size variables significantly influence SME tax compliance in Semarang City. While the variable is not significant effect on tax compliance in Semarang City that is variable of happiness, religiosity, gender, age, education, and marital status.

Keywords: tax morale, tax compliance, MSMEs, binary logistics regression

ABSTRAK

Tax morale merupakan motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik. *Tax morale* yang lebih tinggi akan meningkatkan kepatuhan pajak. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting mendukung perekonomian daerah dan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak *tax morale* terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan *tax morale* yang terdiri dari: (1) kebahagiaan, (2) religiusitas, (3) lingkungan, (4) kelembagaan, dan (5) etika sebagai variabel independen serta variabel kontrol seperti: (1) jenis kelamin, (2) usia, (3) pendidikan, (4) status perkawinan, (5) lama usaha, (6) ukuran usaha dan variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan kepatuhan pajak UMKM. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari 117 sampel UMKM di Kota Semarang serta data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik biner dengan program STATA 14 *for Windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lingkungan, kelembagaan, etika, lama usaha, dan ukuran usaha berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang. Sedangkan variabel yang tidak signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di Kota Semarang yakni variabel kebahagiaan, religiusitas, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan status perkawinan.

Kata kunci: *tax morale*, kepatuhan pajak, UMKM, logistik biner

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan HidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dampak *Tax Morale* Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Semarang”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak baik moril maupun materil, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik.. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di FEB UNDIP.
2. Akhmad Syakir Kurnia, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
3. Dr. Agr Deden Dinar Iskandar, S.E., MA. dan Dr. Dwisetia Poerwono, MSc selaku dosen pembimbing, yang telah banyak sekali memberikan bimbingan, motivasi, arahan, petunjuk, kemudahan, dan ilmu yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi .
4. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis khususnya jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. KESBANG POL LINMAS Kota Semarang, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, dan DJP Jawa Tengah, yang telah memberikan ijin dan membantu penulis dalam memperoleh ketersediaan data selama pelaksanaan penelitian, serta UMKM di Kota Semarang yang bersedia menjadi responden dalam penelitian.

6. Keluarga tercinta, Ayah, Bunda, Teh Nurul, Aa Fathi, Teh syifa yang tiada hentinya untuk selalu memberikan motivasi, perhatian, kesabaran, dan doa yang tulus selama proses penyusunan skripsi ini. Serta Keluarga Besar Mbah Gofar dan Mbah Irfan atas kebersamaan dan keceriaannya dalam hidup penulis.
8. Sahabat sekaligus keluarga di Tembalang, *Anak Sholehah*: Galuh, Nisa, Icha, dan Devi.
9. Teman-teman LPM Edents 2013, 2014, 2015. Khususnya 6P, Divisi *Marcomm* dan Sahabat-sahabat “Jomblo Rapuh” yang telah berjuang bersama selama kepengurusan.
10. Teman-teman KMW FEB Undip, khususnya angkatan 2013 dan Divisi *Business Education* yang telah memberikan pengalaman dan motivasi berwirausaha di usia muda.
11. Semua teman IESP 2013 untuk semua pengalaman yang tidak akan terlupakan.
12. TIM KKN Banyumanis Meringis yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran baru bagi penulis.
13. Seluruh Penghuni Kost Pak Yudi. Terimakasih untuk semua kenangannya.
14. Semua pihak yang telah membantu dan teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat diucapkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan. Oleh karenanya, penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik untuk skripsi ini.

Semarang, 04 September 2017

Muslimah Mahmudah
NIM. 12020113140117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.4 Sistematika Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Pajak.....	16
2.1.1.1 Wajib Pajak.....	17
2.1.1.2 Kewajiban dan Hak-hak Wajib Pajak.....	18
2.1.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	21
2.1.2.1 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.....	23
2.1.3 Kepatuhan Pajak (<i>Tax Compliance</i>).....	23
2.1.4 Moral Pajak (<i>Tax Morale</i>).....	25
2.1.4.1 Kebahagiaan Pajak (<i>Tax Happiness</i>).....	27
2.1.4.2 Religiusitas (<i>Religiosity</i>).....	29
2.1.4.3 Lingkungan.....	29
2.1.4.1 Presepsi Kelembagaan.....	31
2.1.4.1 Etika (<i>Tax Ethics</i>).....	33
2.2 Penelitian Terdahulu	35
2.3 Kerangka Pemikiran.....	45
2.4 Hipotesis.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	48
3.1.1 Variabel Dependen atau Variabel Terikat (Y).....	49
3.1.2 Variabel Independen atau Variabel Bebas (X).....	49
3.1.3 Variabel Kontrol.....	54
3.2 Populasi dan Sampel.....	58
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	59
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	60
3.4.1 Studi Pustaka.....	60

3.4.1 Kuesioner.....	60
3.5 Metode Analisis.....	60
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	60
3.5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	61
3.5.3 Analisis Regresi Logistik Biner.....	61
3.5.4 Uji Hipotesis dan Signifikansi.....	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	69
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	69
4.1.1 Gambaran Umum Kota Semarang.....	69
4.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang.....	69
4.1.3 Karakteristik Demografi.....	70
4.1.4 Karakteristik Ekonomi.....	78
4.1.5 Karakteristik Kepatuhan Pajak.....	85
4.1.6 Karakteristik <i>Tax Morale</i>	88
4.1.7 Kebijakan Pajak di Kota Semarang.....	95
4.2 Analisis Data.....	97
4.2.1 Analisis Validitas dan Reliabilitas.....	97
4.2.2 Analisis Regresi Logistik.....	99
4.2.2.1 Pengujian Kelayakan Model.....	99
4.2.2.2 Pengujian LR Fit.....	99
4.2.2.3 Uji Goodness of Fit.....	97
4.3 Hasil dan Interpretasi Koefisien Regresi.....	102
BAB V PENUTUP.....	115
5.1 Kesimpulan.....	115
5.2 Keterbatasan.....	116
5.3 Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2007-2016	1
Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh Tahun 2013-2015 di Kanwil DJP Jawa Tengah I.....	5
Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota-Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Jutaan Rupiah).....	6
Tabel 1.4 Penerimaan Per jenis Pajak di Kota Semarang Tahun 2013-2015 (Jutaan Rupiah).....	6
Tabel 1.5 Rasio Pencapaian Kepatuhan Pajak di Kota Semarang Tahun 2013-2015.....	7
Tabel 1.6 Penerimaan Pajak Per Klasifikasi Lapangan Usaha Tahun 2013-2015 di Kota Semarang (Jutaan Rupiah).....	8
Tabel 1.7 UMKM Binaan Kota Semarang Tahun 2016	9
Tabel 2.1 Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset.....	22
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Kebahagiaan.....	50
Tabel 3.2 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Religiusitas.....	51
Tabel 3.3 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Lingkungan	52
Tabel 3.4 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Presepsi Kelembagaan	53
Tabel 3.5 Indikator dan Skala Pengukuran Variabel Etika	54
Tabel 3.6 Penentuan Indeks Ukuran Usaha	57
Tabel 3.7 Syarat Uji Hipotesis dan Signifikansi Uji Z	66
Tabel 3.8 Syarat Uji Hipotesis dan Signifikansi Uji LR	68
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2013-2015.....	70
Tabel 4.2 Hasil Penyebaran Kuesioner	71
Tabel 4.3 Responden Pengisi Kuesioner.....	71
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	72
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	72
Tabel 4.6 Deskripsi Statistik Usia.....	73
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Agama	74
Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	75
Tabel 4.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	76
Tabel 4.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan	77
Tabel 4.11 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Etnis	78
Tabel 4.12 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Pribadi	79
Tabel 4.13 Karakteristik Kelas Ekonomi Berdasarkan Perspektif Responden	80
Tabel 4.14 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	81
Tabel 4.15 Deskripsi Statistik Lama Usaha	81
Tabel 4.16 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan	82
Tabel 4.17 Karakteristik Responden Berdasarkan Aset Usaha.....	82

Tabel 4.18 Karakteristik Responden Berdasarkan Omset Usaha.....	83
Tabel 4.19 Karakteristik Responden Berdasarkan Sektor Usaha.....	84
Tabel 4.20 Karakteristik Responden Berdasarkan Ukuran Usaha.....	85
Tabel 4.21 Kepemilikan NPWP	85
Tabel 4.22 Pengetahuan Terkait Besaran Tarif Pajak UMKM	86
Tabel 4.23 Persetujuan Terkait Besaran Tarif Pajak UMKM.....	87
Tabel 4.24 Aktif dalam Organisasi Keagamaan	88
Tabel 4.25 Dibesarkan di Keluarga yang Religius.....	89
Tabel 4.26 Religiusitas Individu	90
Tabel 4.27 <i>Religious Guidance</i>	90
Tabel 4.28 Penilaian Responden Mengenai <i>Tax Morale</i>	91
Tabel 4.29 Rentang Skala Kebahagiaan.....	91
Tabel 4.30 Rentang Kategori Kebahagiaan	91
Tabel 4.31 Rentang Skala Religiusitas	92
Tabel 4.32 Rentang Kategori Religiusitas	92
Tabel 4.33 Rentang Skala Lingkungan	93
Tabel 4.34 Rentang Kategori Lingkungan	93
Tabel 4.35 Rentang Skala Presepsi Kelembagaan	93
Tabel 4.36 Rentang Kategori Presepsi Kelembagaan	94
Tabel 4.37 Rentang Skala Etika	94
Tabel 4.38 Rentang Kategori Etika.....	94
Tabel 4.39 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....	98
Tabel 4.40 <i>Hosmer Lemeshow Test</i>	99
Tabel 4.41 <i>LR Test</i>	100
Tabel 4.42 Hasil Uji Koefisien Determinasi	101
Tabel 4.43 Hasil Uji Hipotesis	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Tax Ratio</i> Indonesia Tahun 2007-2016	2
Gambar 2.1 Dasar Pemikiran Pengeluaran Sektor Publik dan Perpajakan	27
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Data Responden	123
Lampiran B Data Hasil Estimasi Eviews dan Stata 14	143
Lampiran C Transkrip Wawancara	150
Lampiran D Kuesioner Penelitian	160
Lampiran E Dokumentasi Penelitian	166

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan Pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh turunnya tingkat kontribusi dan naiknya *shortfall* dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 terjadi *shortfall* yang lebar sebesar Rp250,3 triliun dan kontribusi sebesar 81,4%. *Gap* yang besar antara realisasi dan target dapat berpotensi menciptakan risiko fiskal dan kredibilitas (reputasi) bagi pemerintah.

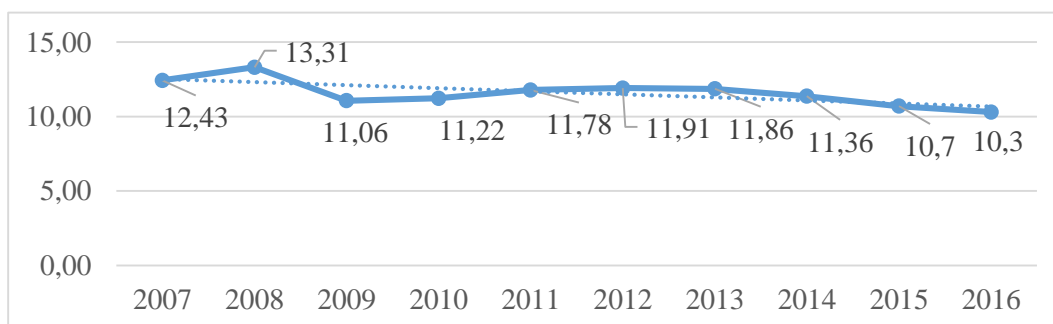
Tabel 1.1
Target, Realisasi, *Shortfall*, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Indonesia
Tahun 2007-2016 (Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Shortfall	Kontribusi (%)
2007	492,01	490,99	1,02	99,79
2008	609,23	658,70	-49,47	108,12
2009	577,39	544,53	32,86	94,31
2010	661,50	627,89	33,61	95,00
2011	763,67	742,74	20,93	97,26
2012	885,03	835,83	49,20	94,40
2013	995,21	921,39	73,82	92,58
2014	1072,38	985,13	87,25	91,86
2015	1294,25	1060,86	233,39	81,97
2016	1355,20	1104,90	250,30	81,40
Rata-rata	870,59	797,30	73,29	93,67

Sumber: Kementerian Keuangan (2017)

Pajak merupakan instrumen fiskal dan memiliki peran besar dalam mendistribusikan pendapatan antar wilayah, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat. Penerimaan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara dalam rangka pembangunan nasional. Pemerintah memiliki program-program unggulan yang membutuhkan pembiayaan cukup besar dengan total anggaran belanja menembus angka Rp2.082,9 triliun pada tahun 2016 (Kemenkeu, 2017a). Namun, disisi lain realisasi penerimaan pajak belum maksimal. Persoalan fundamental di sektor pajak juga masih belum sepenuhnya bisa diatasi seperti rendahnya kepatuhan, tingginya *shadow economy*, basis pajak yang kecil dan sistem informasi perpajakan baik di dalam maupun luar negeri, lemahnya pemerintahan dan kapasitas administrasi, rendahnya tingkat pendapatan per kapita, tabungan domestik, dan investasi hingga kebocoran pajak dikarenakan oleh aktivitas penghindaran pajak.

Gambar 1.1
Tax Ratio Indonesia Tahun 2007-2016 (%)



Sumber : Kementerian Keuangan (2017)

Apabila dilihat dari *tax ratio* yakni perbandingan antara penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), maka Indonesia memiliki tren pertumbuhan positif namun terjadi perlambatan, bahkan cenderung menurun. Gambar 1.1 menunjukkan *tax ratio* Indonesia cenderung mengalami penurunan,

di mana rata-rata kontribusi *tax ratio* selama periode 2007-2016 sebesar 11,59%. Jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, maka nilai *tax ratio* Indonesia masih relatif kecil. Menurut Bank Dunia (2014), *tax ratio* untuk Malaysia sebesar 14,8%, Thailand 16%, dan Singapura 13,9%. *Tax ratio* di Indonesia adalah yang terendah di antara negara-negara G-20 dan negara-negara *emerging markets*. Untuk bisa setara dengan negara-negara berkembang di dunia, setidaknya Indonesia perlu memiliki *tax ratio* 20% dari PDB. Untuk meningkatkan *tax ratio* diperlukan optimalisasi penerimaan pajak terutama dengan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) serta meminimalisir kebocoran penerimaan pajak (DPR RI, 2014)

Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi pemungutan pajak (*tax collection*) selain *tax ratio*, di antaranya ialah *tax coverage ratio*, yaitu rasio antara pajak yang berhasil dipungut dibandingkan dengan potensi pajak yang sebenarnya di dalam perekonomian. Hendri (dikutip oleh Amir, 2014) menunjukkan hasil estimasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) besaran *tax coverage ratio* secara keseluruhan hanya sekitar 50% untuk periode 2005-2009, kemudian meningkat menjadi 60,2% (2010) dan 70,1% (2011).

Penerimaan perpajakan dan *tax ratio* yang rendah dikarenakan masih kecilnya basis pajak. Ekonomi yang masih bergantung pada komoditas dan terkonsentrasi pada WP tertentu. Hal ini diindikasikan oleh masih sedikitnya pembayar pajak dan rendahnya kepatuhan pajak WP. Kepatuhan WP secara formal ditunjukkan oleh banyaknya pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Penerimaan pajak yang rendah membuat pemerintah akan kesulitan dalam membiayai belanja publik yang dapat memicu defisit anggaran sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan sumber dana yang terbatas dan tidak banyak memiliki ruang fiskal. Hasil estimasi *international Monetary Fund* (IMF) dalam Arnold (2012) menyatakan bahwa dengan menambah jumlah Wajib Pajak dan meningkatkan kepatuhan, maka *tax ratio* Indonesia dapat mencapai 21,5%. Artinya dengan membandingkan aktual *tax ratio* saat ini dengan potensi *tax ratio*, maka dapat diasumsikan bahwa tingkat kepatuhan saat ini berada di angka 55-60%.

Program *tax amnesty* yang baru-baru ini dilaksanakan juga merupakan upaya pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan pajak dan menggali potensi pajak. Tercatat jumlah realisasi amnesti pajak mencapai Rp111,7 triliun (Kemenkeu, 2017b). Perluasan basis data (*tax base*) yang diperoleh dari program amnesti pajak dapat dioptimalkan untuk peningkatan penerimaan pajak. Rasio *cost collection* terhadap *tax revenue* di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 0,56% dapat dijadikan ajang untuk meningkatkan penerimaan pajak karena standar Internasional menetapkan rasio sebesar 1% dari *tax revenue*. (Danny Darussalam Tax Center, 2016).

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah WP terdaftar SPT PPh di Kanwil DJP Jawa Tengah I terus meningkat dari tahun 2013 hingga 2015 dengan rata-rata pertumbuhan yakni sebesar 11,92% dan rata-rata pertumbuhan SPT Tahunan PPh yakni sebesar 20,48%. Namun, rasio kepatuhan yang tercatat masih tergolong cukup rendah. Jumlah WP yang tercatat pada tahun 2013 yakni sebanyak

1.085.487 dari 1,7 juta masyarakat yang masuk kategori Wajib Pajak. Dari data tersebut sebanyak 394.752 WP yang telah terdaftar tidak menyampaikan kewajibannya untuk membayar pajak dan jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang ada yakni sebesar 12% dari total wajib pajak potensial.

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh Tahun 2013-2015 di Kanwil DJP Jawa Tengah I

Keterangan	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan
WP Terdaftar	1.085.487	1.239.102	1.359.212	11,92
WP Badan	80.098	90.280	95.751	9,39
WP Orang Pribadi (OP)	1.005.389	1.157.379	1.263.461	12,14
1. OP Non Karyawan	204.167	230.536	230.536	6,46
2. OP Karyawan	801.222	926.843	1.032.925	13,56
SPT Tahunan PPh	683.857	805.416	992.225	20,48
WP Badan	47.258	51.460	64.153	16,78
WP Orang Pribadi (OP)	612.361	745.756	902.596	21,41
1. OP Non Karyawan	75.542	69.161	117.573	30,78
2. OP Karyawan	536.819	676.595	785.023	21,03
Rasio Kepatuhan (%)	63%	65%	73%	67%
WP Badan	59%	57%	67%	61%
WP Orang Pribadi (OP)	61%	64%	71%	65%
1. OP Non Karyawan	37%	30%	51%	39%
2. OP Karyawan	67%	73%	76%	72%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Jateng I (2017)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa perolehan PAD dan pajak daerah tertinggi di Kota-kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 ialah Kota Semarang. Hal ini bisa disebabkan karena Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Kota Semarang juga memiliki kontribusi pajak daerah terhadap PAD terbesar yakni sebesar 67,93%. Hal ini mengindikasikan potensi perpajakan yang tinggi dari Kota Semarang.

Tabel 1.3
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota-Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 (Jutaan Rupiah)

Daerah	PAD	Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD (%)
Provinsi Jateng	10.904.825,81	9.090.677,40	83,36
Kota Magelang	186.677,41	26.185,30	14,03
Kota Pekalongan	152.044,60	47.499,12	31,24
Kota Salatiga	167.010,56	37.859,52	22,67
Kota Semarang	1.201.581,78	816.208,85	67,93
Kota Surakarta	372.798,43	233.085,40	62,52
Kota Tegal	271.601,41	48.409,20	17,82

Sumber: Kementerian Keuangan (2017)

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa Pajak langsung terbesar berasal dari PPh Final (Pajak UMKM) dan Fiskal Luar Negeri (FLN). Sedangkan pajak tidak langsung terbesar berasal dari PPN dan PPnBM di antaranya berasal dari penerimaan pajak UMKM. Hal ini menunjukkan potensi penerimaan pajak UMKM yang besar di Kota Semarang.

Tabel 1.4
Penerimaan Per Jenis Pajak di Kota Semarang Tahun 2013-2015
(Jutaan Rupiah)

Jenis Pajak	2013	2014	2015
1. Pajak Langsung (PPh)			
a. PPh Pasal 21	356.338,12	465.991,61	527.551,23
b. PPh Pasal 22	149.859,27	191.913,50	168.338,35
d. PPh Pasal 23	43.186,65	50.669,45	57.267,74
e. PPh Pasal 25/29 OP	126.617,88	204.640,15	196.497,83
f. PPh Pasal 25/29 Badan	103.521,45	106.398,62	151.265,68
g. PPh Pasal 26	7.084,48	7.383,28	1.283,26
h. PPh Final & FLN	448.029,04	620.112,76	619.086,21
i. PPh Non Migas Lainnya	1,23	24,79	53,00
2. Pajak Tidak Langsung			
a. PPN dan PPnBM	1.371.565,23	1.355.715,62	1.512.979,26
b. Pajak Lainnya	1.780,75	1.222,95	1.016,32
Jumlah/ Total	2.607.984,11	3.004.072,73	3.235.338,88

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan yang terus berkembang dengan pesat sebagai pusat perniagaan dan perdagangan di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Tabel 1.5 menunjukkan bahwa rasio pencapaian kepatuhan pajak tahun 2013-2015 di Kota Semarang belum mencapai target yang diharapkan, dalam arti selalu memperlihatkan pencapaian di bawah 100 persen. Pencapaian diatas 100 persen hanya terjadi sekali di Semarang Tengah 2 pada tahun 2015.

Tabel 1.5
Rasio Pencapaian Kepatuhan Pajak di Kota Semarang
Tahun 2014-2015

Keterangan	SB	STMR	SS	ST1	ST2	SC	SG
Target							
2013	56.435	24.910	12.720	5.779	6.036	70.304	45.016
2014	56.974	25.944	12.252	5.922	5.827	71.835	46.586
2015	55.314	22.657	11.222	5.504	5.378	66.518	40.929
Realisasi							
2013	39.537	19.071	9.219	5.036	4.990	50.919	31.767
2014	40.478	20.089	9.255	5.107	5.057	52.538	33.299
2015	44.406	20.569	10.916	5.370	5.405	54.596	36.589
Rasio							
2013	70,06%	76,56%	72,48%	87,14%	82,67%	72,43%	70,57%
2014	71,05%	77,43%	75,54%	86,24%	86,79%	73,14%	71,48%
2015	80,28%	90,78%	97,27%	97,57%	100,50%	82,08%	89,40%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Jateng I (2017)

Keterangan:

- SB = Semarang Barat
- STMR = Semarang Timur
- SS = Semarang Selatan
- ST1 = Semarang Tengah I
- ST2 = Semarang Tengah II
- SC = Semarang Candisari
- SG = Semarang Gayamsari

Berdasarkan Tabel 1.6 menunjukkan bahwa penerimaan pajak terbesar per klasifikasi lapangan usaha di Kota Semarang ialah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar Rp2.951.066,42. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran menjadi

sektor potensial penerimaan pajak karena merupakan sektor yang paling banyak digeluti oleh UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang tahan krisis dan mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional.

Tabel 1.6
Penerimaan Pajak Per Klasifikasi Lapangan Usaha Tahun 2013-2015 di Kota Semarang (Jutaan Rupiah)

Klasifikasi Lapangan Usaha	2013	2014	2015
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	26.052,19	19.714,09	48.291,01
2. Pertambangan, dan Penggalian	2.323,80	3.935,00	3.347,94
3. Industri Pengolahan	1.632.339,81	1.562.153,64	1.516.213,04
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	57.999,75	53.589,04	71.502,69
5. Bangunan	488.220,92	478.198,46	582.378,94
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	2.307.621,45	2.841.385,40	3.393.487,26
7. Pengangkutan dan Komunikasi	320.880,18	343.343,93	440.629,02
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.081.890,73	1.262.653,08	1.499.095,60
9. Jasa-Jasa Swasta	807.686,90	1.056.417,26	1.209.782,48
X. KLU ERROR	1.246,95	1.442,53	1.538,08
Grand Total	6.726.262,67	7.622.832,45	8.766.266,07

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Jateng (2017)

UMKM dapat menjadi target penerimaan pajak yang potensial. Jumlah UMKM yang dari tahun ketahun semakin menjamur, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* di mana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0,5% dari total penerimaan pajak. Ketidakseimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa

tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (Ibrahim, 2013).

Rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat berbanding terbalik dengan tingkat pertumbuhan usaha di Kota Semarang. Dikutip dari www.sindonews.com., jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang terus mengalami pertumbuhan setiap tahun. Rata-rata pertumbuhan setiap tahun sekitar 1,97% yang didominasi oleh usaha perdagangan dan industri. Pada tahun 2016, jumlah UMKM yang terdata pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sebanyak 11.692 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 18.000 orang. Namun disisi lain, tingkat pertumbuhan usaha yang ada di Kota Semarang memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah.

Tabel 1.7
UMKM Binaan Kota Semarang Tahun 2016

Keterangan	Satuan	Jumlah
1. Jumlah UMKM	unit	1747
Produksi/ Non Pertanian	unit	3
Pertanian	unit	1
Perdagangan	unit	1536
2. Jasa	unit	207
3. Penyerapan Tenaga Kerja	orang	2976
4. Aset	Rp. Milyar	48
5. Omset	Rp. Milyar	169

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (2017)

Tabel 1.7 menunjukkan jumlah UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Semarang tahun 2016 yakni sebesar 1747 usaha. Meskipun jumlah UMKM binaan relatif kecil dan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah UMKM. Namun, UMKM tersebut dapat menyerap tenaga kerja sebanyak

2976 orang, menghasilkan aset sebesar Rp48 milyar dan omset sebesar Rp169 milyar. Untuk itu, jumlah UMKM binaan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai obyek penerimaan pajak di Kota Semarang. Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 46 tahun 2013 tentang penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto dibawah 4,8 milyar dikenakan tarif pajak sebesar 1% dari omset. Namun, apabila UMKM tersebut memiliki omset melebihi 4,8 miliar sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku. UMKM tersebut wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau menjadi wajib PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013.

Sejak awal diterapkannya sistem perpajakan di dunia, pertanyaan utama yang selalu dicari jawabannya adalah faktor apa yang sebenarnya menyebabkan orang membayar pajak atau tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Terdapat dua teori mengenai hal ini, yakni teori ekonomi dan non-ekonomi. Teori ekonomi berargumen bahwa Wajib Pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mendasarkan pada perhitungan ekonomi, yakni seberapa besar manfaat yang diperoleh oleh Wajib Pajak apabila Wajib Pajak melaksanakan peraturan perpajakan atau memutuskan untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Sedangkan salah satu teori non ekonomi yang bisa menjelaskan adalah teori *tax morale*. *Tax morale* menunjukkan motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada

penyediaan barang-barang publik. Apabila wajib pajak memiliki *tax morale* yang baik, maka tingkat kepatuhan akan tinggi dan pada akhirnya penerimaan pajak akan lebih optimal dan dapat menciptakan kepatuhan sukarela (*voluntarily compliance*). Faktor-faktor penentu non ekonomi ini memiliki dampak kuat terhadap penggelapan pajak. Konsep *tax morale* membantu menyelesaikan teka-teki kepatuhan pajak, yaitu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi di banyak negara dengan tingkat pencegahan yang sangat rendah. (Torgler dan Friedrich, 2007).

Torgler (2003a) menjelaskan pentingnya peningkatan lembaga-lembaga sosial guna meningkatkan *tax morale*, akuntabilitas, supremasi hukum, efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi, dan mengurangi korupsi membantu mengurangi insentif terjadinya *shadow economy*. Selain itu, struktur hukum dan keamanan hak milik adalah faktor penting untuk mempengaruhi *shadow economy*. Terdapat hubungan yang kuat antara *tax morale* yang tinggi dengan kualitas kelembagaan yang baik sehingga menyebabkan *shadow economy* yang kecil. *Tax morale* dapat membantu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak atau penggelapan pajak. Kualitas kelembagaan yang baik memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan preferensi, keterlibatan, dan partisipasi dalam proses politik sehingga meningkatkan identifikasi lembaga negara dan melawan kecenderungan aktif dalam *shadow economy*. Partisipasi dan identifikasi akan mengurangi masalah *free rider*.

Penelitian yang dilakukan oleh Luttmer dan Singhal (2014) menjelaskan terdapat lima faktor yang mempengaruhi *tax morale* yakni motivasi intrinsik,

hubungan timbal balik, pengaruh teman, faktor kultural jangka panjang, informasi yang tidak sempurna dan penyimpangan dari memaksimalkan utilitas. Penelitian yang serupa dilakukan oleh OECD (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax morale* dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan kelembagaan. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh McGee (2008) menjelaskan penghindaran pajak berdasarkan etika, apakah penghindaran pajak bersifat etis dan dapat diterima dalam beberapa situasi. Selain itu, Lubian, dan Zari (2011) menunjukkan bahwa moral pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan kuat terhadap kebahagiaan. Kemudian, Torgler (2003b) menjelaskan religiusitas meningkatkan moral pajak. Bobek et. al. (2012) menunjukkan bahwa secara umum norma sosial memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan studi tentang dampak berbagai kasus pajak terhadap moral pajak (*tax morale*) dan kepatuhan pajak (*tax compliance*). Dalam penelitian ini digunakan UMKM sebagai objek penelitian untuk memahami *tax morale* dari wajib pajak yakni pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Ketika UMKM tersebut memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka mereka wajib terdaftar sebagai wajib pajak. Dengan begitu mereka harus membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

1.2 Rumusan Masalah

Penerimaan pajak yang tinggi di Kota Semarang dibandingkan dengan Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah mengindikasikan adanya potensi Kota Semarang sebagai kota percontohan yang taat pajak. Selain itu, penerimaan yang

besar dari PPh Final, dan PPN juga mengisyaratkan potensi penerimaan pajak yang besar dari UMKM. Jumlah UMKM yang terus mengalami peningkatan dan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, investasi, maupun sebagai jaring pengaman sosial dalam menghadapi krisis dan gejolak ekonomi, namun tingkat pertumbuhan usaha yang ada di Kota Semarang memiliki rasio pencapaian dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat pertumbuhan usaha di Kota Semarang sehingga perlu analisis agar terciptanya kepatuhan sukarela (*voluntarily compliance*) melalui teori non ekonomi (*tax morale*). Oleh karena itu diperlukan analisis melalui pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana pengaruh *tax morale* UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Kota Semarang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendasari kemauan UMKM di Kota Semarang dalam membayar pajak?
3. Bagaimana hubungan antara *tax morale* dan kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh *tax morale* UMKM di Kota Semarang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendasari kemauan UMKM di Kota Semarang dalam membayar pajak.

3. Untuk menganalisis hubungan antara *tax morale* dan kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang.

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademis maupun praktis.

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan khususnya dapat meningkatkan *tax morale* dan kepatuhan pajak masyarakat
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya *tax morale* dan kepatuhan pajak serta dapat membantu dalam perkembangan penelitian mengenai perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian lain sejenis.
3. Bagi praktisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan dan meningkatkan pengetahuan bagi wajib pajak atau pelaku UMKM mengenai perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang ingin membayar pajak dilihat dari segi *tax behavior* dan *tax morale* individu sehingga pendekatan yang dilakukan kepada wajib pajak atau UMKM akan lebih tepat.

1.4. Sistematika Penelitian

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan laporan hasil penelitian sebagai berikut:

1. BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang

masalah dan rumusan masalah. Bab ini juga menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

2. BAB II menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis dampak *tax morale* terhadap kepatuhan pajak, selain itu juga terdapat kerangka pemikiran dari penelitian ini.
3. BAB III menguraikan metode penelitian meliputi definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang mendukung penelitian.
4. BAB IV menguraikan hasil dan analisis yang terdiri dari deskripsi objek penelitian yang berisi gambaran umum objek penelitian Kota Semarang, analisis data, dan pembahasan.
5. BAB V menguraikan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran bagi pihak yang terkait dengan masalah penelitian.